

2025



PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN
WATANG SIDENRENG



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan dalam penyusunan RENJA ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA ini.

Watang Sidenreng, Juli 2025
Camat Watang Sidenreng



H.ARNOL BARAMULI, ST.M.Adm.KP

Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19730208 200802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN ...	6
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025..	6
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan	
Watang Sidenreng	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	24
BAB IV PENUTUP	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah,

baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng. Sejalan dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kantor Kecamatan Watang

Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 9);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Watang Sidenreng adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Watang Sidenreng untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. **PENDAHULUAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan i tahun 2025, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

BAB III. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.

BAB IV. **PENUTUP**



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 **Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.**

Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

- 2.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0%.
- 2.1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 20%.
- 2.1.3 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan

pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0%.

2.1.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target 9,21%.

2.1.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Umum terdiri atas Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan realisasi sebanyak 25%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur, kelurahan tentang kebijakan pemerintah kabupaten;
3. Terlambatnya proses pencairan anggaran program kegiatan yang terkait;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Watang Sidenreng berhasil di observasi dan dihipunkan fenomenanya sebagai kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut sebagai berikut;

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar

mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

3. Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.
4. Peningkatan akses ketetapan waktu dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.1.a. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KANTOR KECAMATAN WATANG SIDENRENG

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2025/REALISASI 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10
7					Unsur Kewilayahan								
7	01				Kecamatan								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	1		0	0	1	1
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	100 %	1		0	0	1	1

						Camat								
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	8	Urs	0	0	0	0	0	0
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	8	Urs	0	0	0	0	0	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	6.8		20	0	20	20
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0		0	0	0	0
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2	Laporan	0	0	0	0	0	0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	13.5		25	0	25	25
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan	2	Lembaga masyarakat	0	0	100	0	0	0

						pembangunan							
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6 unit	4	0	0	0	4	67
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 Org	50	0	0	0	50	50
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2 Laporan	0	0	0	0	0	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	- 0	0	0	25	0	25	25
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- 0	0	0	25	0	25	25
7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- 0	0	0	25	0	25	25
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0	0	0	0	0	0

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	0	0	0	0	0	0
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8	Desa	0	0	0	0	0	0
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8	Desa	0	0	0	0	0	0
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	8	Desa	0	0	0	0	0	0
X					X									
X	XX				XX									
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	18	0	0	9,21	9,21	9,21
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	13	0	0	25	25	25
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan	Waktu Penyediaan Gaji	70	Bln	14	0	0	25	25	20

					Tunjangan ASN	dan Tunjangan ASN							
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	26	0	0	10	10	10
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	10	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Unit	2	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	97 Unit	20	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	0 Kali	0	0	0	25	25	25
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	700 Kali	150	0	0	25	25	25
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	6			8	8	8

					Daerah	Pemerintah Daerah								
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	12 Unit	12	0	0	0	12	20	
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	41	0	0	10	10	10	
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	700 lbr	100	0	0	0	30	30	
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Bln	12	0	0	0	12	33	
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	36 Bln	12	0	0	0	12	33	
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4				4	4	
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	11 Unit	11	0	0	0	11	60	

X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	15	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4	Unit	2	0	0	0	2	30

II.1.b. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KANTOR KECAMATAN WATANG SIDENRENG

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TABEL PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025
------	---	--	--	--	---	---

						TAHUN 2024/REALISASI 2025-2029	DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2029	TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10
7					Unsur Kewilayahan								
7	01				Kecamatan								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		12	1	8	12	12
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %		12	1	8	12	12
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	12 Urs		12	1	8	1	8
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		5.1	2.9	56	5	5
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		4	3	75	4	4
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	5 Laporan		4	3	75	3	60

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%		6.3	2.8	100	6	6
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	4	Lembaga masyarakat		4	4	100	4	100
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6	unit		3	0	0	0	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	15	Lembaga masyarakat		15	5	33	5	33
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	3	Laporan		3	2	67	2	67
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%		100.0	50.0	50	100	100
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%		4	2	50	4	4
7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Laporan		4	2	50	2	50
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%		8	4	50	8	8

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%		8	4	50	8	8
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8	Dokumen		8	4	50	4	50
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8	Dokumen		8	4	50	4	50
X					X									
X	XX				XX									
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%		27	11	43	27	27
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%		43	29	43	43	43
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	350	org/Bln		350	150	43	150	43
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%		33	16	50	33	33
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bln		12	6	50	6	30
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	8	Unit		8	4	50	4	50
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	48	Unit		48	24	50	24	50

X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	48	Kali		48	24	50	24	50
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	Kali		48	24	50	24	50
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%		35	1	3	35	35
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	54	Unit		54	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16	Unit		16	2	13	2	3
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		12	6	50	12	12
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	lbr		12	6	50	6	50
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bln		12	6	50	6	50
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12	Bln		12	6	50	6	50
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		12	5	44	12	12
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	13	Unit		13	3	23	3	14

X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	18	Unit		18	10	56	10	56
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5	Unit		5	3	60	3	36

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Watang Sidenreng sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan

tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan daerah kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati ke Camat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dimana pada tahun 2025 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan koordinasi dengan indikator kinerja yaitu persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan nilai 100% dan peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2025 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel III.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD KANTOR KECAMATAN WATANG
SIDENRENG

KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
						SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHA N DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPO K PENERIM A MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHA N DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPO K PENERIM A MANFAAT
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7				Unsur Kewilayahan									
7	01			Kecamatan									
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Watang Sidenreng	100 %	700000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	10 0 %	300000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Watang Sidenreng	100	%	700000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	100	%	300000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	700000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	10	Laporan	300000	Kec. Watang Sidenreng
7	01	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Watang Sidenreng	100	%	33306200 0	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	100	%	33158700 0	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng
7	01	03	2.01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Watang Sidenreng	100	%	500000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	200000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Watang Sidenreng	4	Laporan	500000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	2	Laporan	200000	Masyarakat at Kec. Watang Sidenreng
7	01	03	2.02	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Watang Sidenreng	100	%	332562000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	331387000	Masyarakat at Kec. Watang Sidenreng
7	01	03	2.02	05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kec. Watang Sidenreng	4	Lembaga masyarakat	7000000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	4	Lembaga masyarakat	6125000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng
7	01	03	2.02	08	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	Kec. Watang Sidenreng	3	unit	303962000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	3	unit	303962000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng

7	01	03	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Watang Sidenreng	100	%	21000000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	36	Lembaga masyrak at	21000000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng
7	01	05	2.01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	600000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	3	unit	300000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng
7	01	03	0	0	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Watang Sidenreng	100	%	50000000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	50000000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	50000000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	50000000	Masyarak at Kec. Watang Sidenreng

7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Watang Sidenreng	12	Dokumen	50000000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	12	Dokumen	50000000	Masyarakat Kec. Watang Sidenreng
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Watang Sidenreng	100	%	1200000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	600000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Watang Sidenreng	100	%	1200000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	600000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. Watang Sidenreng	8	Dokumen	600000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	8	Dokumen	300000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng

7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. Watang Sidenreng	8	Dokumen	600000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	8	Dokumen	300000	Aparatur Desa Kec. Watang Sidenreng
X					X											
X	xx				XX											
X	xx	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Watang Sidenreng	100	%	3105330000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	3031488000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	xx	01	2.02	0	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	2465892300	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	2465892400	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Watang Sidenreng	350	Org	2465892300	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	350	Org	2465892400	ASN Kec. Watang Sidenreng

X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	196598000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	132441000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Watang Sidenreng	12	Paket	11983000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	12	Paket	11983000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Watang Sidenreng	8	Paket	13594000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	8	Paket	13383000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Watang Sidenreng	48	paket	10015500	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	48	paket	9057500	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kec. Watang Sidenreng	48	bulan	46611000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	48	bulan	42306000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Watang Sidenreng	48	Laporan	114394500	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	48	Laporan	55711500	ASN Kec. Watang Sidenreng

X	XX	01	2.07	0	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	103390000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	86178000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kec. Watang Sidenreng	54	unit	22924000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	54	unit	22924000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec. Watang Sidenreng	16	unit	80466000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	16	Unit	63254000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.08	0	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Watang Sidenreng	100	%	264131700	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	254266600	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	2925000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	2925000	ASN Kec. Watang Sidenreng
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	47100000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	47100000	ASN Kec. Watang Sidenreng

						dan listrik											
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	214106700	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	12	Laporan	204241600	ASN Kec. Watang Sidenreng	
X	XX	01	2.09	0	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Watang Sidenren g	100	%	75318000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	100	%	92530000	ASN Kec. Watang Sidenreng	
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Watang Sidenreng	13	unit	37462000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	13	unit	37462000	ASN Kec. Watang Sidenreng	
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Watang Sidenreng	18	unit	12478000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	18	unit	12478000	ASN Kec. Watang Sidenreng	

X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Watang Sidenreng	5	unit	25378000	ASN Kec. Watang Sidenreng	Kec. Watang Sidenreng	5	unit	42590000	ASN Kec. Watang Sidenreng
JUMLAH										3,490,292,000					3,413,795,000	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025, dengan memperhatikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Setelah document ini ditetapkan akan dilakukan penyusunan RKA dan penyesuaian penginputan dalam SIPD sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan watang sidenreng sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik- baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Watang Sidenreng;

3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan watang sidenreng;
4. Kantor Kecamatan Watang Sidenreng berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Watang Widenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

Watang Sidenreng, Juli 2025
CAMAT WATANG SIDENRENG

H.ARNOL BARAMULI, ST,M.Adm.KP

Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19730208 200802 1 001